Hasil Penelitian

TANGGAPAN PEMERINTAH DAN PUBLIK TERHADAP MASALAH KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA DI KOTA PADANG

Oleh
Jendrius
Nessi Novita Dewi

Abstract

This research try to ellaborate government and public respons to youth reproductive health issues. The finding of the research saw both government and public belive reproductive health is a personal, sensitive and not important issue.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Kesehatan reproduksi dan seksual remaja bukan merupakan sebuah isu baru di Indonesia. Sejak tahun 1980-an pemerintah telah mencanangkan beberapa program yang mengusung tema kesehatan reproduksi dan seksual remaja ini. Namun bagi sebagian orang masalah kesehatan reproduksi dan seksual remaja dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan tidak layak diperbincangkan dihadapan remaja. Hal ini menimbulkan apa yang disebut Myles sebagai pereduksian makna tentang seksualitas dan kesehatan reproduksi pada aspek fisik- hubungan seks, sehingga seksualitas cenderung tidak diakui sebagai sesuatu yang alamiah dan hanya sah dibicarakan dalam lembaga perkawinan (Dewi:1998).

Padahal remaja sebagai mahluk seksual yang telah mulai matang secara fisik dan psikologis membutuhkan pengetahuan dan informasi yang benar mengenai perkembangan yang terjadi pada dirinya.

Permasalahan remaja yang menyangkut kesehatan reproduksi dan seksual bukan hal yang asing lagi bagi masyarakat di Indonesia,

pemerintah berkaitan dengan kesehatan reproduksi remaja di kota Padang
2. Memetakan peluang dan kendala yang dihadapi pemerintah dan publik dalam usaha pengembangan program kesehatan reproduksi remaja di kota Padang

3. Kontribusi Penelitian

1. Diperolehnya gambaran yang lebih konprehensif mengenai peluang dan potensi yang dihadapi dalam pengembangan program pemerintah.
2. Dihasilkannya rekomendasi dan saran kongrit kepada pengelola atau instansi terkait untuk pengembangan program informasi dan layanan kesehatan reproduski bagi remaja di kota Padang.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Remaja dan Kesehatan Reproduksi Remaja

Remaja adalah masa peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa, meliputi semua perkembangan yang dialamainya sebagai persiapan memasuki masa dewasanya sehingga pertumbuhan seks merupakan faktor yang penting. Menurut Jerald seperti dikutip Widjanarko mendefenisikan masa remaja sebagai masa peralihan dari masa kanak-kanak kemasa dewasa yang ditandai dengan timbulnya tanda-tanda pubertas dan berlangsungnya pematangan seksual sampai tercapainya pertumbuhan fisik dan mental yang maksimal sejak usia kira-kira 12-21 tahun (Widjanarko, 1996 : 6).

Masa remaja adalah masa yang rentan dengan masalah seksualitas, oleh karena itu perilaku seksual remaja penting mendapat perhatian agar dalam menyalurkan dorongan seksnya secara positif, sehat dan bertanggung jawab. Jika tidak akan membawa malapetaka yang bisa menghancurkan hidupnya karena dapat mendorong remaja untuk berprilaku seksual aktif (melakukan hubungan intim sebelum menikah), yang mempunyai resiko yang merugikan.

Berbagai resiko tersebut diantaranya kehamilan remaja, aborsi, penyakit menular seksual, gangguan saluran reproduksi dan berbagai gangguan serta tekanan psikoseksual. Umuk mencegah resiko reproduksi pada remaja maka, sebaiknya remaja mengetahui dan mempelajari tentang kesehatan reproduksi agar tidak salah jalan dalam pergaulan sehari-hari.

Sementara kesehatan reproduksi remaja didefenisikan oleh Family Care International adalah keadaan sejahtera fisik dan psikis seorang remaja, termasuk terbebas dari kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi yang tidak aman, penyakit menular seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS serta semua bentuk kekerasan dan pemaksaan seksual (Fauzi, 2001 : 37).

2. Hasil Penelitian Yang Relevan

Pada tahun 1988 pemerintah mengadakan sebuah program yang bernama *Family Life Education* (pendidikan kehidupan keluarga), program ini pendekatannya lebih kepada keluarga dimana keluarga sebagai komunitas yang diharapkan bisa mensosialisasikan pendidikan seks (*sex education*) terhadap anak-anak mereka. Tapi program ini, hasilnya tidak begitu memuaskan dikarenakan kurangnya komitmen dan dukungan pemerintah dalam bentuk kebijakan yang mengatur tentang pendidikan seksual dan reproduksi bagi remaja terutama disetiap sekolah, lemahnya kerjasama lintas sektoral (Depsos, Depdiknas, Depkes) dan kecenderungan menganggap LSM pesaing sekaligus musuh pemerintah menjadi hambatan penyelenggaraan program tersebut.

METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Menurut Bodgan dan Taylor seperti dikutip Moleong metode kualitatif diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata tertulis dan lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Moleong, 1989 : 3).

Dipilihnya pendekatan dengan metode penelitian kualitatif ini dikarenakan pendekatan kualitatif memiliki keunggulan dalam mengungkap realitas sosial terutama yang berhubungan dengan aspek *meaning* dan *coveri*.

Pemerintah yang dimaksud di dalam penelitian ini adalah institusi pemerintah yang bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan permasalahan remaja. Institusi pemerintah itu diantaranya: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA), Dinas Pendidikan Nasional (DIKNAS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), Departemen Agama (DEPAG), Dinas Kesehatan Kota (DKK), Dinas Kesejahteraan Sosial (DINKESOS).

Sementara itu mengingat publik mencakup individu dan institusi yang sangat luas, maka dalam penelitian ini dicoba memfokuskan perhatian kepada individu dan institusi yang berhubungan langsung dengan remaja (non pemerintah), dan pihak-pihak yang *concern* terhadap masalah kesehatan reproduksi remaja.

Dengan memperhatikan berbagai kriteria tersebut maka dipilih informan sebagai berikut: ***Tokoh Masyarakat & Agama*** (LKAAM, Bundo Kanduang, Dewan Perwaktilan Rakyat Daerah Komisi E), Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majelis Budha Indonesia (MBI), Pastoral Gereja Katedral Theresia, Persatuan Gereja Indonesia (PGI), ***Media Massa Cetak*** (Singgalang, Haluan, Padang Express), ***Media Elektronik*** (TVRI, RRI, Sushi FM, Arbes FM, Sipp FM, Classy FM), ***Lembaga Swadaya Masyarakat*** (LP2M dan KPMM), dan ***Guru*** (SMU Adabiah dan SMU 2 Padang).

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik *indept interview*. Menurut Lincoln dan Guba seperti yang dikutip Moleong (1989) menjelaskan bahwa wawancara adalah mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, tuntutan, kepedulian, pengalaman, perasaan, harapan, dan lain-lain.

Data yang diperoleh dari hasil wawancara dianalisis dengan cara menyederhanakan data dalam bentuk yang mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan, kemudian direduksi dan disusun secara sistematis, sehingga dapat memberikan gambaran yang pada akhirnya memberikan kesimpulan dari penelitian tersebut.

TEMUAN PENELITIAN

1. Tanggapan Pemerintah

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa instansi pemerintah diperoleh gambaran bahwa permasalahan remaja yang utama di kota Padang adalah masalah penyalahangunaan obat dan narkotika (narkoba), seks pra nikah, pengaruh media massa, pengaruh budaya luar, dan pornografi. Namun permasalahan remaja yang dianggap paling besar dan mengkhawatirkan adalah masalah Narkoba.

Mengerucutnya pendapat informan tentang permasalahan remaja dikota Padang kepada sebuah persoalan yakni narkoba sesungguhnya merupakan fenomena yang menarik. Sementara permasalahn lain yang menyangkut

hal-hal yang *covert*, berhubungan dengan persoalan pribadi seperti seks pra nikah, kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), pornografi, Penyakit menular Seksual (PMS) seolah menjadi tidak begitu signifikan.

Hal yang sama juga terjadi dalam faktor penyebab permasalahan remaja, hampir semua informan mengatakan faktor pemicu terjadinya permasalahan remaja tersebut adalah lemahnya kontrol orang tua terhadap anak, kurangnya pendidikan agama, pengaruh teman sebaya dan lingkungan. Tidak terungkap bahwa salah satu penyebab timbulnya permasalahan remaja tersebut menyangkut minimnya informasi dan edukasi berbagai persoalan yang perlu diketahui remaja sehingga bisa menghindarkan mereka dari kemungkinan salah dalam bertindak dan berbuat, yang nota bene menjadi tanggung jawab pemerintah.

Ketika dicoba menginventarisir berbagai program pemerintah yang pernah dilaksanakan dengan target group remaja, masing-masing instansi membanggakan program-program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh lembaga mereka. Ketika didalami, ditemukan bahwa kegiatan yang dilaksanakan Pemerintah Kota Padang yang berkaitan dengan remaja cenderung bersifat seremonial, insidental, dan lebih mengutamakan aspek formal saja.

Berbagai program remaja yang dikelola oleh pemerintah umumnya dilaksanakan karena kegiatan tersebut telah terprogram sedemikian rupa sehingga sekedar melaksanakan sesuai dengan jadwal kegiatan dan jarang sekali ada tindak lanjutnya.

Dari berbagai instansi pemerintah yang diwawancarai boleh dikatakan baru BKKBN-lah lembaga pemerintah yang memang mengkhususkan diri pada program-program remaja yang terkait dengan kesehatan reproduksi lewat program Orientasi Kelompok Reproduksi Remaja (KRR). Namun dalam pelaksanaannya pun kegiatan KRR ini masih belum berjalan sebagaimana mestinya. Berbagai kendala diantaranya masalah waktu dan dana.

Sementara itu instansi lain umumnya melakukan kegiatan untuk remaja lebih bersifat insidental dan tidak terprogram serta cenderung memilih model konvensional seperti ceramah, seminar dan diskusi yang kalau ditelaah lebih jauh kurang cocok dengan target group remaja. Ini

tentunya juga akan sangat berpengaruh terhadap *out put* dan *out come* dari kegiatan itu sendiri. Namun hal tersebut tampak tidak menjadi perhatian serius dari berbagai instansi tersebut.

Kenyataan diatas secara jelas menunjukkan bahwa instansi pemerintah pun tidak cukup paham dengan permasalahan kesehatan reproduksi. Dalam kasus narkoba disatu sisi dapat memberikan dampak buruk terhadap kesehatan reproduksi remaja. Demikian juga aktifitas narkoba dapat menjadi jalan masuk bagi terinfeksinya remaja terhadap penyakit menular seksual atau HIV/AIDS.

Jadi dapat dikatakan bahwa persoalan kesehatan reproduksi remaja di kota Padang belum menjadi isu publik belum ditemukannya indikasi bahwa isu mengenai kesehatan reproduksi remaja ini akan menjadi program yang strategis oleh pemerintah kota.

2. Tanggapan Publik

Dari hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa institusi publik yang terpilih dalam penelitian ini ditemukan pernyataan yang sama dengan pemerintah tentang permasalahan remaja kota Padang saat ini yaitu; terkait dengan permasalahan narkoba, free seks dan pergaulan bebas. Akan tetapi permasalahan pergaulan bebas menjadi permasalahan yang cukup *urgent* dibandingkan dengan masalah lainnya karena pergaulan bebas menjadikan kondisi remaja dikota Padang kehilangan pegangan baik itu adat istiadat, moral dan agama.

Dari uraian di atas terlihat perbedaan pendapat antara pemerintah dan publik dalam memahami siapa yang harus bertanggung jawab terhadap permasalahan remaja. Disatu sisi pemerintah beranggapan bahwa permasalahan remaja merupakan tanggungjawab orang tua, sementara publik lebih melihat bahwa permasalahan remaja adalah tanggungjawab semua pihak.

Publik juga melihat sudah sepantasnya permasalahan remaja menjadi perhatian khusus baik bagi pihak pemerintah maupun publik. Hal tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya adanya kerjasama antara publik dan pemerintah. Memang pada kenyataannya terjalin kerja sama antara publik, dan pemerintah terutama pada program yang di rancang oleh pemerintah, namun pada pelaksanaannya keterlibatan publik dalam program tersebut sangat terbatas. Hal ini dikarenakan tidak

adanya *follow up* dan tidak terbedayakannya semua program remaja yang ada, sehingga mengindikasikan bahwa pemerintah kurang sungguh-sungguh terhadap pelaksanaan program.

Dari keterangan diatas dapat ditegaskan bahwa menurut publik, pemerintah memang melihat permasalahan yang dihadapi remaja sudah mengkhawatirkan , hanya saja tindak lanjut dari pemerintah belum menampakkan hasil yang nyata. Meskipun pemerintah sudah mempunyai perhatian terhadap persoalan yang tengah terjadi, namun program yang dibuat ataupun yang dilaksanakan pemerintah belum maksimal, terprogram dan berkesinambungan.

a. Publik & Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Secara umum publik tidak memiliki program khusus tentang remaja yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Hanya satu LSM saja yang memang *concern* dengan permasalahan kesehatan reproduksi remaja seperti LSM PKBI, publik melihat masalah kesehatan reproduksi dianggap sebagai masalah pribadi yang tidak begitu penting untuk diekspos dibanding permasalahan lain. Publik juga beranggapan bahwa masalah kesehatan reproduksi tersebut merupakan tanggung jawab dari lembaga tertentu saja.

Bagi mass media baik cetak maupun elektronik yang mengemban misi sebagai media informasi dan mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai *social control* dalam berbagai program yang dicanangkan oleh pemerintah. Akan tetapi umumnya dalam membuat program masih mengedepankan unsur provit, sehingga program yang dibuat bukan berdasarkan tujuan edukasi dan informasi. Aspek trend dan selera pasar lebih menjadi pertimbangan utama sehingga mampu menarik sponsor dan iklan. Disamping itu mereka memiliki posisi tawar yang cukup untuk mendesak pemerintah agar lebih serius dalam menanggulangi permasalah remaja, paling-paling dalam bentuk pemberitaan dan opini.

Selain media massa, tokoh masyarakat dan tokoh agama juga memiliki akses untuk memberikan informasi kesehatan reproduksi pada remaja, namun mereka tidak memiliki program khusus mengenai hal itu. Umumnya program yang berkenaan dengan kesehatan reproduksi dilaksanakan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga yang *concern* dengan kesehatan reproduksi. Kerjasama itu

berbentuk menjadi narasumber dalam acara seminar. Sementara tokoh agama memberikan penekanan terhadap aspek pendalaman ajaran agama, sedangkan untuk permasalahan, seperti narkoba, seks bebas, dan lain sebagainya hanya disampaikan ketika ceramah-ceramah umum.

LSM sebagai lembaga yang berada diluar pemerintah, berfungsi sebagai tempat untuk menampung dan memberdayakan masyarakat sesuai dengan bidang yang ditangani. Namun dalam kenyataannya hanya sedikit sekali LSM di Padang yang concern terhadap persoalan kesehatan reproduksi remaja. Dari 11 LSM yang menjadi anggota konsorsium pengembangan masyarakat Madani (KPMM) yang merupakan jaringan kerja LSM di Sumatera Barat hanya satu LSM saja yang memfokuskan perhatian terhadap masalah remaja.

Sekolah sebagai sebuah sarana pendidikan adalah salah satu wadah yang tepat untuk pembinaan terhadap remaja, karena institusi ini adalah institusi legal dan bertujuan untuk perbaikan generasi baik secara mental maupun akademis dan permasalahan kesehatan remaja adalah salah satu hal yang sangat pantas menjadi perhatian pihak sekolah.

Namun hasil penelitian menunjukkan meskipun permasalahan remaja merupakan tanggung jawab sekolah, pihak sekolah jarang sekali berinisiatif untuk mengembangkan program-program yang berhubungan dengan masalah kesehatan reproduksi. Hal itu tidak saja mengingat beban seokalh yang sudah demikian berat akan tetapi kendala dana dalam mengembangkan program menjadi kendala utama.

PENUTUP

1. Kesimpulan

Pertama, umumnya pemerintah dan publik menganggap permasalahan kesehatan reproduksi merupakan hal penting, namun permasalahan tersebut belum prioritas utama dikarenakan masalahan remaja yang dianggap paling *urgent* saat ini adalah masalah penyalahgunaan narkotika.

Kedua, terjadi simplifikasi terhadap konsep dan permasalahan reproduksi remaja menjadi terbatas pada aspek klinis dan biomedis. Hal ini dikarenakan baik aparat pemerintah apalagi publik masih belum memahami secara baik konsep kesehatan reproduksi itu sendiri.

Ketiga, Instansi pemerintah yang terkait masih beranggapan

bahwa permasalahan kesehatan reproduksi bukan merupakan tanggung jawab mereka,melainkan menjadi tanggung jawab dan urusan instansi tertentu.

Keempat, dalam pelaksanaan program oleh pemerintah seringkali terkendala oleh berbagai permasalahan, seperti minimnya anggaran dan dana, kurangnya koordinasi antara masing-masing instansi yang terkait dan kurang seriusnya pemerintah dalam menangani masalah tersebut.

Kelima, belum terlihat adanya kerjasama yang kongkrit antara pemerintah dan publik yang dalam merancang dan melaksanakan kegiatan yang lebih terprogram dan kontinyu.

Keenam, media massa yang merupakan bagian dari publik dan diharapkan dapat menjalankan peran dan fungsinya sebagai media komunikasi dan sekaligus social control dalam kenyatannya lebih berorientasi kepada selera pasar dan orientasi profit. Mereka juga beranggapan bahwa issu mengenai kesehatan reproduksi remaja tersebut kurang memiliki "nilai jual".

Ketujuh, dikarenakan masalah kesehatan reproduksi dianggap tidak menjadi permasalahan utama yang dihadapi remaja saat ini, maka publik sebagai salah satu komponen yang berperan sebagai *pressure group* tidak pernah mendesak pemerintah untuk melaksanakan program tentang kesehatan reproduksi tersebut.

Kedelapan, baik pemerintah maupun publik beranggpan bahwa isu kesehatan reproduksi merupakan masalah yang sensitif dan personal. Karena itu masalah kesehatan reproduksi remaja tersebut tetap menjadi *personal trouble* dan tidak muncul menjadi *public issue*.

2. Rekomendasi

Pertama, perlu adanya program dan kegiatan untuk memberikan pemahaman pada instansi pemerintah, bahwa permasalahan kesehatan reproduksi dan seksualitas remaja adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tanggung jawab instansi yang secara khusus berhubungan dengan permasalahan ini seperti BKKBN dan DKK. Hal tersebut mengingat permasalahan kesehatan reproduksi ini berkaitan erat dengan berbagai aspek seperti pendidikan, agama, sosiokultural.

Kedua, Perlu adanya kerjasama yang berkesinambungan antara instansi pemerintah dengan institusi publik, sehingga adanya keterlibatan yang signifikan bagi publik

terhadap program-program pemerintah dalam permasalahan kesehatan seksual dan kesehatan reproduksi remaja.

Ketiga, perlu adanya program pemerintah yang tepat sasaran dan variatif, menyentuh segenap golongan remaja (baik remaja sekolah maupun remaja putus sekolah). Begitu juga dengan pilihan media komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) yang menarik dan sesuai dengan karakteristik remaja sebagai *target group*.

Keempat, program yang dilaksanakan oleh pemerintah hendaknya terencana, terprogram dan berkesinambungan serta ada evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaan program.

Kelima, publik seharusnya mampu memberikan *pressure* terhadap pemerintah akan pentingnya program yang terencana, terprogram dan komprehensif yang menyangkut persoalan kesehatan reproduksi remaja.

DAFTAR PUSTAKA

Adrina, dkk, 1998. ***Hak-Hak Reproduksi Perempuan yang Terpasung.*** Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Chadwick, Bruce, dkk 1991. ***Metode Penelitian Ilmu Pengetahuan Sosial.*** Semarang, IKIP Semarang Press.

Dwiyanto, Agus, dan Muhadjir Darwin, 1996. ***Seksualitas, Kesehatan Reproduksi, dan Ketimpangan Jender***. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Faisal, Muhammad,1998, ***Aborsi Tradisional: Pengalaman Dukun dan Klien.*** Yogjakarta, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gajah Mada.

Fauzi, Ahmad dan Marcy Lucianawati, 2001. ***Jender dan Kesehatan (Kumpulan Artikel 1998-2001).*** Jakarta, Kerjasama Pusat Komunikasi Kesehatan Berspektif Jender dengan Ford Foundation.

Fitrawati, 2002. "Seks dan Seksualitas di Kalangan Remaja, Kajian Tentang Realitas Simbolik di Tingkat Komunitas Siswa SMU". ***Skripsi***. Jurusan Sosiologi, FISIP, Universitas Andalas, Padang.

Hull, Terence H, 1997. ***Pelacuran Di Indonesia: sejarah dan perkembanganuya.*** Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Laporan Nasional Tindak Lanjut KTT Anak 1990-2000.

Moleong, Lexy J. 1990. ***Metodologi Penelitian Kualitatif.*** Bandung. Remaja Rosdakarya.

S. Nasution, Prof. Dr, Ma, 1995. ***Metode Research. Penelitian Ilmiah.*** Jakarta, Bumi Aksara.

Widjanarko, Muhammad. 1999. ***Seksualitas Remaja***. Yogkarta, Pusat Penelitian Kependudukan, UGM.

Kompas, *"Sebanyak 60 Persen aborsi Dilakukan oleh Remaja"*, 22 Juli 2002, Jakarta.

Suarta, Siswandi, *"Pendidikan Seksual dan Reproduksi Berbasis Sekolah"*, www.bkkbn.com, 2000.